

ABSTRAK

Penelitian dengan judul Implementasi Penetapan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) atas Jual Beli Tanah dan atau Bangunan di Kota Pekalongan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasinya serta upaya dalam mengatasi permasalahan penetapan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) atas Jual Beli Tanah dan atau Bangunan di Kota Pekalongan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis empiris*, yang bersifat *deskriptif analisis*, dengan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yakni melalui wawancara yang dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara *kualitatif*, permasalahan dianalisis dengan teori kepastian hukum dan teori kemanfaatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) implementasi penetapan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) atas Jual Beli Tanah dan atau Bangunan di Kota Pekalongan meliputi pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan, penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB, pembayaran BPHTB, pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan, pelaporan BPHTB, penagihan dan pengurangan; (2) kendala yang dihadapi dalam implementasi penetapan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) atas Jual Beli Tanah dan atau Bangunan di Kota Pekalongan serta bagaimana solusinya adalah ketidakjujuran dari wajib pajak tentang harga transaksi dari nilai perolehan objek pajak. Wajib pajak tidak mau membayar sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dan meminta pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan, serta solusinya adalah dilakukan *verifikasi* lapangan terhadap objek yang dikenai Bea Perolehan hak atas Tanah dan atau Bangunan dan diberikan pengurangan terhadap Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan disesuaikan dengan kondisi wajib pajak agar tidak membebani dan memberatkan wajib pajak.

Kata Kunci : Pajak, Pajak Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

ABSTRACT

The study entitled The Implementation of Determination Paying Tax on Acquisition of Land and or Building (BPHTB) on Sale and Purchase of land and or building in Pekalongan aims to identify and analyze how its implementation as well as efforts to overcome the problems of the determination of payment Tax on Acquisition of Land and or Building (BPHTB) on Sale and Purchase of land and or building in Pekalongan.

This study used juridical empirical approach, descriptive analysis, the data used is primary data and secondary data, through interviews conducted in Finance Agency of Pekalongan and literature study were then dianalisis qualitatively, the problem is analyzed with the theory of legal certainty and theory of expediency.

The results showed that: (1) the implementation of payment assignments Customs Acquisition Rights to Land and or Building (BPHTB) on Sale and Purchase of land and or building in Pekalongan include the maintenance of the deed of transfer of land, buildings, research Tax Payment Regions BPHTB, BPHTB payment, registration of the agreement of transfer of land, buildings, BPHTB reporting, billing and reduction; (2) obstacles encountered in the implementation of payment assignments Customs Acquisition Rights to Land and or Building (BPHTB) on Sale and Purchase of land and or building in Pekalongan and how the solution was dishonesty of taxpayers on the transaction price of the acquisition value tax. Taxpayers do not want to pay according to a predetermined amount and ask for a reduction in the acquisition of land and or building rights, and the solution is to do field verification of the object subject to the acquisition of land and or building rights and given a reduction in land acquisition fees. and or the building is adjusted to the condition of the taxpayer so as not to burden and burden the taxpayer.

Keywords: Tax, Local Tax, Tax on Acquisition of Land and Buildings.